

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 35 PK/Pdt-Sus-HKI/2014, mengenai makna pihak yang berkepentingan, pengadilan dalam tingkat pengadilan niaga sampai peninjauan kembali telah salah menerapkan hukum, dikarenakan majelis hakim beranggapan bahwa yang berkepentingan dalam melakukan pembatalan pendaftaran desain industri hanyalah pemilik atau pemegang lisensi dari desain industri tersebut serta dikuatkan oleh putusan *Judex Juris*. Padahal Firma Salim selaku distributor tunggal justru merupakan pihak yang berkepentingan sebab di Peninjauan Kembali, Firma Salim menunjukkan adanya surat pemberian kuasa dan surat penyerahan hak desain industri dimana Firma Salim seharusnya memiliki *Persona Standi in Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri.

Mengenai Unsur Kebaruan, apabila mengacu pada pasal 25 (1) TRIPs dan EU Design Directive, Desain Industri milik Dong A Pencil tidak memiliki Unsur Kebaruan, karena dalam pasal 25 ayat (1) serta EU Design Directive tersebut mendefinisikan adanya unsur kebaruan apabila adanya perbedaan signifikan dengan desain industri lain sedangkan apabila dibandingkan antara Desain Industri milik Wang Jin Xi dengan Desain Industri milik Dong A pencil, tidak ada perbedaan signifikan.

2. Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 129 PK/Pdt.Sus/2011, mengenai makna pihak yang berkepentingan dan mengenai unsur kebaruan, *Judex Factie* telah tepat dalam menerapkan hukum karena desain industri milik Honggo Siswanto terbukti tidak memiliki unsur kebaruan dan juga dengan disitanya

produk milik Sylvyn AW tentu mengakibatkan kerugian sehingga Sylvyn AW merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan

Akan tetapi pada tingkat kasasi, Judex Juris telah salah menerapkan hukum karena mengabulkan permohonan kasasi Honggo Siswanto dengan alasan Sylvyn AW bukan merupakan pihak yang berkepentingan dengan mengaitkan Undang-Undang Merek sebagai acuan untuk menyelesaikan sebuah perkara desain industri.

Pada tingkat Peninjauan Kembali, hakim telah tepat dalam menerapkan hukum dengan memberikan putusan untuk membatalkan pendaftaran desain industri milik Honggo Siswanto dengan alasan tidak memiliki unsur kebaruan

3. Berdasarkan hasil analisis terdapat kekurangan dalam Undang Undang Desain Industri khususnya makna pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil analisis penulis, penulis menemukan bahwa negara lain seperti Kanada, India dan Brazil telah mengatur tentang makna pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan didefinisikan sebagai pihak yang terlibat dengan pemilik dari desain industri atau pemilik lisensi dari desain industri tersebut sehingga apabila dilakukan perbaikan dalam Undang Undang desain industri mengenai makna pihak yang berkepentingan sebagaimana negara-negara tersebut maka sengketa seperti Firma Salim dan Dong A Pencil maupun Sylvyn AW dan Honggo Siswanto dapat dihindari.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu dibuat revisi terhadap Undang-Undang no 31 Tahun 2000 dengan memberikan penjelasan yang rinci tentang makna pihak yang berkepentingan agar tidak terjadi lagi kekaburan dalam membuat putusan.
2. Bagi pemilik desain industri, hendaknya mendaftarkan desain industrinya di Indonesia sehingga memiliki legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan pembatalan

pendaftaran desain industri.

3. Bagi Hakim, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri hendaknya benar-benar memahami kepentingan dari penggugat dan mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri apabila ternyata gugatan tersebut terbukti tergugat tidak memiliki unsur kebaruan.
4. Bagi Hakim, dalam memutus perkara pembatalan pendaftaran desain industri hendaknya tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan akan tetapi perlu juga memperhatikan rasa keadilan.